



























memenuhi kebutuhan publik atas produk makanan, pakaian, dan perumahan, karena kebutuhan umum itu jauh lebih penting daripada kebutuhan seorang individu.”

Ibnu Taimiyah membedakan dua tipe penetapan harga, yaitu: tidak adil dan tidak sah, serta adil dan sah. Penetapan harga yang tidak adil dan dilarang berlaku atas naiknya harga akibat kompetisi kekuatan pasar yang bebas mengakibatkan terjadinya kekurangan suplai atau menaikkan permintaan.

Meskipun Ibnu Taimiyah tidak pernah menggunakan istilah “Kompetisi” atau menyebut semua syarat terjadi kompetisi yang sempurna, ia menggunakan terima itu di tempat manapun. Hal itu tampak jelas dari pandangannya tentang fungsi pasar, yang dinyatakan pada beberapa syarat dari kompetisi yang sempurna, dalam pikirannya. Misalnya ia menulis bahwa “memaksa penduduk menjual barang-barang dagangan tanpa ada dasar kewajiban untuk menjual, merupakan tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.”

Beberapa implikasi dari doktrin kebebasan ekonomi dalam Islam. Dalam kaitannya dengan pasar, dapat dibaca dalam pikiran-pikiran Ibnu Taimiyah sebagai berikut:

1. Orang-orang bebas masuk dan meninggalkan pasar.
2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang perdagangan (komoditas) adalah perlu.

3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar. Dia juga membolehkan campur tangan pemerintah untuk menentukan harga barang-barang sejenis jika unsur-unsur monopolistik menampilkan diri.

Tetapi manakala terjadi suatu kondisi semisal bencana kelaparan, maka menurut Ibnu Taimiyah pemerintah harus ikut campur untuk menetapkan harga.

Dalam penetapan harga, perbedaan harus dibuat antara pedagang lokal yang memiliki stok barang dan pemasok luar yang memasok barang itu. Tidak boleh ada penetapan harga atas barang dagangan milik pemasok luar. Tetapi, mereka bisa diminta untuk menjual seperti rekaman importir mereka menjual. Pengawasan atas harga akan mengakibatkan merugi terhadap pasokan barang impor, dimana sebelumnya secara lokal tidak membutuhkan kontrol atas harga barang, karena akan merugikan pembeli. Dalam kasus harga barang di masa darurat, kebijakan regulasi harga oleh pemerintah akan berhasil secara efektif dan sukses untuk diterapkan. Ibnu Taimiyah juga tak lupa menegaskan bahwa agar harga yang adil itu terjamin. Maka harus ada kesesuaian antara jumlah uang yang beredar, total nilai transaksi dan tingkat harga. Dan sedikit tambahan bahwasanya Ibnu Taimiyah tidak menginginkan pemerintah dalam mencetak uang dengan harga yang tidak sebenarnya atau mencari keuntungan sendiri.



















Transaksi jual beli memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sah hukumnya, diantara syarat dan rukun dalam jual beli *istiṣnā'* adalah sebagai berikut:

1. Penyebutan atau penyepakatan kriteria barang pada saat akad dilangsungkan, persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat jatuh tempo penyerahan barang yang dipesan.
2. Tidak dibatasi waktu penyerahan barang, apabila ditentukan waktu penyerahan barang, maka akadnya secara otomatis berubah menjadi akad *salam*, sehingga berlaku pada seluruh hukum akad *salam*, demikianlah pendapat Imam Abu Hanifah, akan tetapi kedua muridnya yaitu Abi Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan menyeteliskannya, mereka berdua berpendapat bahwa tidak mengapa menentukan waktu penyerahan dan tidak merubahnya menjadi akad *salam*, karena demikianlah tradisi masyarakat sejak dahulu kala akad *istiṣnā'*. Dengan demikian tidak ada alasan untuk menentukan waktu penyerahan pesanan, karena tradisi ini tidak menyetelisihi dalil ataupun hukum syariat.
3. Barang yang dipesan adalah barang yang bisa dipesan dengan akad *istiṣnā'*. Persyaratan ini sebagai imbas langsung dari dasar diperbolehkannya akad *istiṣnā'*, telah dijelaskan diatas bahwa akad *istiṣnā'* diperbolehkan didasarkan atas tradisi umat Islam. Barang yang dijadikan obyek akad disyaratkan jelas jenisnya, ciri-ciri dan















membuat kontrak *istiṣnā'* kedua untuk memenuhi kewajibannya pada kontrak pertama. Kontrak baru ini dikenal sebagai *istiṣnā'* paralel.

Ada beberapa konsekuensi saat bank Islam menggunakan kontrak *istiṣnā'* paralel. Diantaranya adalah:

1. Bank Islam sebagai pembuat pada kontrak pertama tetap merupakan satu-satunya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajibannya. *Istiṣnā'* paralel atau subkontrak untuk sementara harus dianggap tidak ada. Dengan demikian, sebagai *shāni'* pada kontrak pertama, bank tetap bertanggung jawab atas setiap kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran kontrak yang berasal dari kontrak paralel.
2. Penerima sub kontrak pembuatan pada *istiṣnā'* paralel bertanggung jawab terhadap bank Islam sebagai pemesan. Dia tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan nasabah pada kontrak pertama akad. *Bai' istiṣnā'* kedua merupakan kontrak paralel, tetapi bukan merupakan bagian atau syarat untuk kontrak pertama. Dengan demikian, kedua kontrak tersebut tidak mempunyai kaitan hukum sama sekali.
3. Bank sebagai *shāni'* atau pihak yang siap untuk membuat atau mengadakan barang, bertanggung jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan subkontraktor dan jaminan yang timbul darinya. Kewajiban inilah yang membenarkan keabsahan *istiṣnā'* paralel, juga menjadi dasar bahwa bank boleh memungut keuntungan kalau ada.